

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) APBD Provinsi terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahun anggaran 2025 sebesar Rp27.236.885.047.666,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah sebesar Rp26.310.974.126.666,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
  - b. belanja daerah sebesar Rp27.227.708.425.426,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah),  
Defisit sebesar (Rp916.734.298.760,00) (sembilan ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
  - c. pembiayaan daerah:
    1. penerimaan sebesar Rp925.910.921.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
    2. pengeluaran sebesar Rp9.176.622.240,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),  
pembiayaan netto sebesar Rp916.734.298.760,00 (sembilan ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah),  
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp26.310.974.126.666,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp17.455.975.529.666,00 (tujuh belas triliun empat ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.317.000.000.000,00 (tiga belas triliun tiga ratus tujuh belas miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.940.474.330.889,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp497.400.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp701.101.198.777,00 (tujuh ratus satu miliar seratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp8.826.998.597.000,00 (delapan triliun delapan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.816.998.597.000,00 (delapan triliun delapan ratus enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp27.227.708.425.426,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8 . . .

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp20.913.116.943.639,00 (dua puluh triliun sembilan ratus tiga belas miliar seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.903.461.428.540,00 (delapan triliun sembilan ratus tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.578.296.561.801,00 (delapan triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.475.000.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.254.897.453.298,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.986.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.094.647.730.787,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja . . .

a. belanja . . .

- a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal gedung dan bangunan.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp467.210.149.648,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp295.173.789.378,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp182.881.196.121,00 (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp143.173.490.640,00 (seratus empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.209.105.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan juta seratus lima ribu rupiah).

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp90.750.115.000,00, (sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11 . . .

### Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp5.129.193.636.000,00 (lima triliun seratus dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.498.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp631.193.636.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 12

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp916.734.298.760,00 (sembilan ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp925.910.921.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa . . .

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp925.910.921.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)..
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp9.176.622.240,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.176.622.240,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp916.734.298.760,00) (sembilan ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp916.734.298.760,00 (sembilan ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Provinsi tahun anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;

- b. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2026;
  - c. lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan ; tahun anggaran 2026;
  - d. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tahun anggaran 2026;
  - e. lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2026;
  - f. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar tahun anggaran 2026;
  - g. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD tahun anggaran 2026;
  - h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD tahun anggaran 2026;
  - i. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah tahun anggaran 2026;
  - j. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2026;
  - k. lampiran XI daftar piutang daerah tahun anggaran 2026;
  - l. lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2026;
  - m. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain tahun anggaran 2026;
  - n. lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan tahun anggaran 2026;
  - o. lampiran XV daftar dana cadangan tahun anggaran 2026; dan
  - p. lampiran XVI daftar pinjaman daerah tahun anggaran 2026.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 3 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: (12-307/2025).



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>17.455.975.529.666,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	13.317.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.940.474.330.889,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	497.400.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	701.101.198.777,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>8.826.998.597.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.816.998.597.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.000.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>28.000.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>26.310.974.126.666,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.913.116.943.639,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	8.903.461.428.540,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.578.296.561.801,00
5.1.04	Belanja Subsidi	26.475.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.254.897.453.298,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	149.986.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.094.647.730.787,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467.210.149.648,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.173.789.378,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	182.881.196.121,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	143.173.490.640,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.209.105.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>90.750.115.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	90.750.115.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.129.193.636.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.498.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	631.193.636.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>27.227.708.425.426,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-916.734.298.760,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>925.910.921.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	925.910.921.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.176.622.240,00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>925.910.921.000,00</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.176.622.240,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>916.734.298.760,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025  
Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.303.336.481.66 6,00	14.861.651.707.4 31,00	1.019.709.408.6 00,00	0,00	0,00	15.881.361.116.0 31,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	22.821.193.114,0 0	8.255.903.121.27 6,00	359.326.383.054 ,00	0,00	0,00	8.615.229.504.33 0,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	3.793.005.950,00	7.336.968.742.43 4,00	289.434.638.698 ,00	0,00	0,00	7.626.403.381.13 2,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0001	SMK NEGERI 1 SURABAYA	1.707.795.275,00	1.731.970.775,00	0,00	0,00	0,00	1.731.970.775,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0002	SMK NEGERI 5 SURABAYA	306.500.000,00	296.206.000,00	22.944.000,00	0,00	0,00	319.150.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0003	SMK NEGERI 6 SURABAYA	367.830.700,00	400.480.700,00	0,00	0,00	0,00	400.480.700,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0004	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO	1.450.260.240,00	1.457.910.240,00	0,00	0,00	0,00	1.457.910.240,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0005	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	467.530.706,00	480.180.706,00	0,00	0,00	0,00	480.180.706,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0006	SMK NEGERI 2 MALANG	753.000.000,00	747.060.000,00	32.240.000,00	0,00	0,00	779.300.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0007	SMK NEGERI 4 MALANG	1.225.800.000,00	1.238.100.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	1.261.100.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0008	SMK NEGERI 11 MALANG	332.900.000,00	318.970.463,00	33.729.537,00	0,00	0,00	352.700.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0009	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	207.000.000,00	227.300.000,00	0,00	0,00	0,00	227.300.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0010	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	1.202.500.000,00	1.068.000.000,00	156.800.000,00	0,00	0,00	1.224.800.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0011	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI	197.900.000,00	213.200.000,00	0,00	0,00	0,00	213.200.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0012	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO	320.025.500,00	337.825.500,00	0,00	0,00	0,00	337.825.500,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0013	SMK NEGERI 5 JEMBER	638.800.000,00	654.100.000,00	0,00	0,00	0,00	654.100.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0014	SMK NEGERI 3 MADIUN	288.441.200,00	314.741.200,00	0,00	0,00	0,00	314.741.200,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0015	SMK NEGERI 1 PACITAN	90.000.000,00	105.300.000,00	0,00	0,00	0,00	105.300.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0016	SMK NEGERI 2 KOTA PASURUAN	138.410.000,00	150.090.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	155.090.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0017	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	147.357.870,00	72.657.870,00	90.000.000,00	0,00	0,00	162.657.870,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0018	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI	409.500.000,00	420.800.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	430.800.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0019	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO	100.425.000,00	122.225.000,00	0,00	0,00	0,00	122.225.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0020	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO	220.000.000,00	231.845.000,00	13.455.000,00	0,00	0,00	245.300.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0021	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	0,00	127.629.042.877,00	2.832.594.679,00	0,00	0,00	130.461.637.556,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0022	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	0,00	53.451.861.966,00	5.051.790.224,00	0,00	0,00	58.503.652.190,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0023	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	0,00	40.999.828.170,00	2.022.793.780,00	0,00	0,00	43.022.621.950,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0024	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	0,00	34.499.632.310,00	2.343.846.588,00	0,00	0,00	36.843.478.898,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0025	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	0,00	41.184.116.884,00	3.137.770.552,00	0,00	0,00	44.321.887.436,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0026	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	0,00	30.432.091.935,00	1.670.548.229,00	0,00	0,00	32.102.640.164,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0027	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	0,00	33.486.960.877,00	3.787.607.433,00	0,00	0,00	37.274.568.310,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0028	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	0,00	30.835.838.313,00	5.237.998.871,00	0,00	0,00	36.073.837.184,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0029	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	0,00	47.575.538.452,00	5.725.895.056,00	0,00	0,00	53.301.433.508,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0030	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	0,00	26.932.242.464,00	2.380.111.972,00	0,00	0,00	29.312.354.436,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0031	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	0,00	41.754.867.546,00	4.313.236.324,00	0,00	0,00	46.068.103.870,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0032	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	0,00	11.235.599.899,00	371.491.795,00	0,00	0,00	11.607.091.694,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0033	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	0,00	46.511.554.088,00	3.113.863.802,00	0,00	0,00	49.625.417.890,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0034	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	0,00	26.156.194.146,0 0	3.253.557.836,0 0	0,00	0,00	29.409.751.982,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0035	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	0,00	28.400.029.063,0 0	2.891.511.345,0 0	0,00	0,00	31.291.540.408,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0036	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	0,00	34.583.905.134,0 0	4.290.356.722,0 0	0,00	0,00	38.874.261.856,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0037	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	0,00	27.266.332.384,0 0	1.989.215.760,0 0	0,00	0,00	29.255.548.144,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0038	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	0,00	66.593.414.118,0 0	4.430.307.908,0 0	0,00	0,00	71.023.722.026,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0039	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	0,00	28.370.145.588,0 0	2.523.510.764,0 0	0,00	0,00	30.893.656.352,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0040	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	0,00	40.007.100.776,0 0	1.363.170.240,0 0	0,00	0,00	41.370.271.016,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0041	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	0,00	21.717.271.835,0 0	1.664.268.835,0 0	0,00	0,00	23.381.540.670,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0042	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	0,00	15.060.480.256,0 0	1.415.153.046,0 0	0,00	0,00	16.475.633.302,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0043	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	0,00	19.956.136.800,0 0	761.421.708,00	0,00	0,00	20.717.558.508,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0044	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	0,00	15.000.270.118,0 0	569.074.400,00	0,00	0,00	15.569.344.518,0 0
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0045	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	0,00	1.470.700.550,00	1.529.299.450,0 0	0,00	0,00	3.000.000.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0046	UPT PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	0,00	4.379.393.000,00	170.607.000,00	0,00	0,00	4.550.000.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0047	SMK NEGERI 2 NGANJUK	190.047.636,00	205.347.636,00	0,00	0,00	0,00	205.347.636,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0048	SMK NEGERI 1 BANYUWANGI	632.712.732,00	817.501.424,00	0,00	0,00	0,00	817.501.424,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0049	SMK NEGERI 1 LUMAJANG	300.000.000,00	319.727.000,00	17.573.000,00	0,00	0,00	337.300.000,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0050	SMK NEGERI KALIBARU BANYUWANGI	1.303.966.300,00	1.338.266.300,00	0,00	0,00	0,00	1.338.266.300,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0051	SMK NEGERI 6 JEMBER	293.550.000,00	313.040.400,00	0,00	0,00	0,00	313.040.400,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	23.383.000.000,0 0	110.679.708.747, 00	1.356.760.896,0 0	0,00	0,00	112.036.469.643, 00
5	04	5.04.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.383.000.000,0 0	108.685.357.867, 00	1.288.180.896,0 0	0,00	0,00	109.973.538.763, 00
5	04	5.04.0.00.0.00.01.0001	UPT SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.994.350.880,00	68.580.000,00	0,00	0,00	2.062.930.880,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	31.567.007.522,0 0	69.848.478,00	0,00	0,00	31.636.856.000,0 0
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	31.567.007.522,0 0	69.848.478,00	0,00	0,00	31.636.856.000,0 0
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	1.043.830.000,00	101.442.678.777, 00	341.248.223,00	0,00	0,00	101.783.927.000, 00
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	0,00	23.054.721.000,0 0	50.638.000,00	0,00	0,00	23.105.359.000,0 0
5	07	5.07.0.00.0.00.02.0000	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	26.300.000,00	18.533.367.262,0 0	181.658.738,00	0,00	0,00	18.715.026.000,0 0
5	07	5.07.0.00.0.00.03.0000	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	45.000.000,00	15.582.810.940,0 0	5.383.060,00	0,00	0,00	15.588.194.000,0 0
5	07	5.07.0.00.0.00.04.0000	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	522.530.000,00	15.895.578.000,0 0	2.819.000,00	0,00	0,00	15.898.397.000,0 0
5	07	5.07.0.00.0.00.05.0000	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	450.000.000,00	14.382.394.575,0 0	100.749.425,00	0,00	0,00	14.483.144.000,0 0
5	07	5.07.0.00.0.00.06.0000	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	0,00	13.993.807.000,0 0	0,00	0,00	0,00	13.993.807.000,0 0
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	73.758.094.000,0 0	2.407.000,00	0,00	0,00	73.760.501.000,0 0
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	73.758.094.000,0 0	2.407.000,00	0,00	0,00	73.760.501.000,0 0

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0,00	73.758.094.000,00	2.407.000,00	0,00	0,00	73.760.501.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	401.405.622.500,00	128.313.000,00	0,00	0,00	401.533.935.500,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	401.405.622.500,00	128.313.000,00	0,00	0,00	401.533.935.500,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	401.405.622.500,00	128.313.000,00	0,00	0,00	401.533.935.500,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>26.294.966.426.666,00</b>	<b>20.913.116.943.639,00</b>	<b>1.094.647.730.787,00</b>	<b>90.750.115.000,00</b>	<b>5.129.193.636.000,00</b>	<b>27.227.708.425.426,00</b>

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	26.310.974.126.666, 00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.455.975.529.666, 00	
4.1.01	Pajak Daerah	13.317.000.000.000, 00	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.940.474.330.889,0 0	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	497.400.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	701.101.198.777,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	8.826.998.597.000,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.816.998.597.000,0 0	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.000.000.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.000.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.000.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN		
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Proporsi PTK Bersertifikat jenjang SLB Proporsi PTK Bersertifikat jenjang SMK Proporsi PTK Bersertifikat jenjang SMA Kemampuan Numerasi Jenjang SMK Kemampuan Literasi Jenjang SMK Kemampuan Numerasi Jenjang SMA Kemampuan Literasi Jenjang SMA Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat penyerapan lulusan SMK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		

Indikator Keluaran	: jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Bangkalan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Banyuwangi jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Blitar jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Bojonegoro jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Bondowoso jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Jember jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Kabupaten Gresik jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Kabupaten Malang jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Kediri jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Kota Malang jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Lamongan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Madiun jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Mojokerto jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Nganjuk jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Pacitan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Pamekasan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Pasuruan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Ponorogo jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Probolinggo jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Sampang jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Sidoarjo jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Sumenep jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Tulungagung Jumlah Pendidik SMA yang memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan metode pembelajaran Jumlah peserta didik yang mengikuti pelatihan inkubator bisnis dan kompetensi vokasi Jenjang SMA		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.269.310,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.850.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.950.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.725.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.575.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.160.261,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.700.846.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.675.634.204,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.263.890,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	

PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	925.910.921.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	925.910.921.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.176.622.240,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		DINAS PENDIDIKAN										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi PTK Bersertifikat jenjang SLB Proporsi PTK Bersertifikat jenjang SMK Proporsi PTK Bersertifikat jenjang SMA Kemampuan Numerasi Jenjang SMK Kemampuan Literasi Jenjang SMK Kemampuan Numerasi Jenjang SMA Kemampuan Literasi Jenjang SMA Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat penyerapan lulusan SMK	46,08 persen 49,17 persen 53,53 persen 66,23 persen 69,60 persen 75,52 persen 78,81 persen 83,57 persen 91,66 Persen								
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Bangkalan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Banyuwangi jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Blitar jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Bojonegoro jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Bondowoso jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Jember jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Jombang jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Kabupaten Gresik jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di	6996 anak 15582 anak 11805 anak 24602 anak 10956 anak 25736 anak 9588 anak 12810 anak 12730 anak 24051 anak 13116 Orang 12257 anak 19219 anak 14576 anak 12752 anak 3608 anak 5973 anak 10794 anak 16700 anak 11404 anak 4298 anak 37689/3585 3 anak 6767 anak 19282 anak								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wilayah Kabupaten Malang jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Kediri jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Kota Malang jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Lamongan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Madiun jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Mojokerto jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Nganjuk jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Pacitan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Pamekasan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Pasuruan jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Ponorogo jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Probolinggo jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Sampang jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Sidoarjo jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Sumenep jumlah anak usia 16-18 tahun yg mendapatkan layanan pendidikan di Wilayah Tulungagung Jumlah Pendidik SMA yang memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan metode pembelajaran Jumlah peserta didik yang mengikuti pelatihan inkubator bisnis dan kompetensi vokasi Jenjang SMA	14.026 Orang 154 orang								
1	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)										
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	4.097.269.310,00	19.950.000.000,00	0,00	0,00	24.047.269.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	3.225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah										
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	75 Paket	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1.775.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik										
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	700.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	875.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2546 Peserta Didik	270.160.261,00	0,00	0,00	0,00	270.160.261,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.763.664.266,00	0,00	0,00	0,00	1.763.664.266,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6858	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	27.942.000,00	0,00	0,00	0,00	27.942.000,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Laporan								
6859	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
6860	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.190.000,00	93.199.000,00	0,00	0,00	129.389.000,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan								
6861	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.705.000,00	0,00	0,00	0,00	7.705.000,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6862	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	586.100.000,00	0,00	0,00	0,00	586.100.000,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6863	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total		
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.675.634.204,00	0,00	0,00	0,00	1.675.634.204,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan								
6864	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	89.400.000,00	0,00	0,00	0,00	89.400.000,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6865	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	252.263.890,00	0,00	0,00	0,00	252.263.890,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6866	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	87.300.000,00	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6867	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Halaman 1385



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah			
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	PELAYANAN UMUM								
1	01	1	01	Pendidikan	4.963.311.904.161,00	1.680.638.491,00	0,00	0,00	4.964.992.542.652,00
1	01	1	02	Kesehatan	4.597.112.193.953,00	168.166.183.432,00	0,00	0,00	4.765.278.377.385,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	413.961.167.365,00	2.461.235.000,00	0,00	0,00	416.422.402.365,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	360.579.280,00	0,00	0,00	0,00	360.579.280,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	84.360.167.960,00	278.084.040,00	0,00	0,00	84.638.252.000,00
1	01	1	06	Sosial	231.659.978.850,00	93.373.210,00	0,00	0,00	231.753.352.060,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	205.431.093.435,00	63.938.000,00	0,00	0,00	205.495.031.435,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.864.688.042,00	50.221.000,00	0,00	0,00	26.914.909.042,00
1	01	2	09	Pangan	171.170.776.000,00	73.668.000,00	0,00	0,00	171.244.444.000,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	43.604.398.200,00	102.235.000,00	0,00	0,00	43.706.633.200,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	604.378.000,00	233.300.000,00	0,00	0,00	837.678.000,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.966.138.802,00	77.270.198,00	0,00	0,00	40.043.409.000,00
1	01	2	15	Perhubungan	172.654.681.729,00	1.403.910.290,00	0,00	0,00	174.058.592.019,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	45.791.790.662,00	205.064.110,00	0,00	0,00	45.996.854.772,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	41.868.488.618,00	200.930.900,00	0,00	0,00	42.069.419.518,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	33.589.598.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	33.639.598.000,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	42.446.467.000,00	76.130.000,00	0,00	0,00	42.522.597.000,00
1	01	2	20	Statistik	1.804.574.628,00	17.284.000,00	0,00	0,00	1.821.858.628,00
1	01	2	22	Kebudayaan	71.526.651.476,00	92.737.104,00	0,00	0,00	71.619.388.580,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	2	23	Perpustakaan	51.456.674.000,00	67.085.000,00	0,00	0,00	51.523.759.000,00
1	01	2	24	Kearsipan	817.947.554,00	8.171.000,00	0,00	0,00	826.118.554,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	158.128.673.028,00	3.771.688.644,00	0,00	0,00	161.900.361.672,00
1	01	3	26	Pariwisata	1.109.006.000,00	65.994.000,00	0,00	0,00	1.175.000.000,00
1	01	3	27	Pertanian	154.163.266.694,00	1.399.649.038,00	0,00	0,00	155.562.915.732,00
1	01	3	28	Kehutanan	186.108.604.125,00	276.654.463,00	0,00	0,00	186.385.258.588,00
1	01	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	30.277.898.954,00	22.824.930,00	0,00	0,00	30.300.723.884,00
1	01	3	30	Perdagangan	3.261.587.346,00	0,00	0,00	0,00	3.261.587.346,00
1	01	3	31	Perindustrian	97.234.992.600,00	3.308.400,00	0,00	0,00	97.238.301.000,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	1.421.140.632.932,00	1.042.507.608,00	0,00	0,00	1.422.183.140.540,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	708.840.396.426,00	6.522.729.574,00	0,00	0,00	715.363.126.000,00
1	01	5	01	Perencanaan	90.945.927.132,00	37.317.868,00	0,00	0,00	90.983.245.000,00
1	01	5	02	Keuangan	639.000.190.595,00	5.120.668.385,00	90.750.115.000,00	5.129.193.636.000,00	5.864.064.609.980,00
1	01	5	03	Kepegawaian	51.871.535.078,00	166.173.000,00	0,00	0,00	52.037.708.078,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	110.679.708.747,00	1.356.760.896,00	0,00	0,00	112.036.469.643,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	31.567.007.522,00	69.848.478,00	0,00	0,00	31.636.856.000,00
1	01	5	07	Penghubung	101.442.678.777,00	341.248.223,00	0,00	0,00	101.783.927.000,00
1	01	6	01	Inspektorat	73.758.094.000,00	2.407.000,00	0,00	0,00	73.760.501.000,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	401.405.622.500,00	128.313.000,00	0,00	0,00	401.533.935.500,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	47.509.420.000,00	1.144.566.000,00	0,00	0,00	48.653.986.000,00
2	03	1	06	Sosial	6.227.325.000,00	0,00	0,00	0,00	6.227.325.000,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	3.317.973.043,00	7.470.000,00	0,00	0,00	3.325.443.043,00
3				EKONOMI					

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	427.316.314.375,00	183.178.543.584,00	0,00	0,00	610.494.857.959,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	45.288.887.501,00	1.818.763.864,00	0,00	0,00	47.107.651.365,00
3	04	2	09	Pangan	4.570.040.000,00	0,00	0,00	0,00	4.570.040.000,00
3	04	2	15	Perhubungan	332.587.061.506,00	36.531.275.475,00	0,00	0,00	369.118.336.981,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	12.029.237.150,00	496.305.000,00	0,00	0,00	12.525.542.150,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	57.783.405.482,00	7.943.000,00	0,00	0,00	57.791.348.482,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	6.613.203.000,00	136.797.000,00	0,00	0,00	6.750.000.000,00
3	04	2	21	Persandian	1.703.839.450,00	7.219.000,00	0,00	0,00	1.711.058.450,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	61.228.532.829,00	9.912.882.499,00	0,00	0,00	71.141.415.328,00
3	04	3	27	Pertanian	126.291.390.488,00	804.447.780,00	0,00	0,00	127.095.838.268,00
3	04	3	28	Kehutanan	11.238.234.080,00	67.059.760,00	0,00	0,00	11.305.293.840,00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	15.241.356.916,00	1.143.149.200,00	0,00	0,00	16.384.506.116,00
3	04	3	30	Perdagangan	19.113.412.654,00	0,00	0,00	0,00	19.113.412.654,00
3	04	3	31	Perindustrian	4.637.980.000,00	318.761.000,00	0,00	0,00	4.956.741.000,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.170.738.500,00	0,00	0,00	0,00	2.170.738.500,00
4	05	2	10	Pertanahan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	8.523.626.000,00	206.374.000,00	0,00	0,00	8.730.000.000,00
4	05	3	28	Kehutanan	3.876.420.804,00	22.978.500,00	0,00	0,00	3.899.399.304,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.159.410.500,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	31.159.410.500,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	34.147.710.000,00	7.290.000,00	0,00	0,00	34.155.000.000,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	508.074.885.140,00	291.832.918.840,00	0,00	0,00	799.907.803.980,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.370.345.322,00	0,00	0,00	0,00	1.370.345.322,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	20.695.450.000,00	0,00	0,00	0,00	20.695.450.000,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	3.292.591.217.115,00	357.645.744.563,00	0,00	0,00	3.650.236.961.678,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	61.499.185.000,00	0,00	0,00	0,00	61.499.185.000,00
8	10	2	22	Kebudayaan	37.033.500.000,00	82.038.000,00	0,00	0,00	37.115.538.000,00
8	10	2	23	Perpustakaan	1.798.373.161,00	307.523.000,00	0,00	0,00	2.105.896.161,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	234.688.695.232,00	220.831.440,00	0,00	0,00	234.909.526.672,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.013.986.020,00	17.297.000,00	0,00	0,00	4.031.283.020,00
9	11	3	32	Transmigrasi	325.627.200,00	0,00	0,00	0,00	325.627.200,00
				<b>TOTAL</b>	<b>20.913.116.943.639,00</b>	<b>1.094.647.730.787,00</b>	<b>90.750.115.000,00</b>	<b>5.129.193.636.000,00</b>	<b>27.227.708.425.426,00</b>

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	199.445.280,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.250.000.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	847.000.000,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	16.921.870.916,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.136.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.012.756.608,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.830.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.050.000.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24.047.269.310,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	5.995.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	376.699.617.706,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.225.000.000,00
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	526.000.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	228.800.000,00
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	33.047.740.852,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.388.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	550.637.858.058,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.685.713.500,00
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.168.304.600,00
		Total	1.024.081.201.830,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
2.	Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	158.870.420,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	285.775.560,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	718.588.160,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	387.510.914,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3.830.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	28.402.675.300,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.830.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	998.310.780,00
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	1.490.261.838,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2.540.350.846,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.610.991.300,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8.302.000.000,00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.800.000,00		
Total			47.906.795.118,00
3.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3.352.019.440,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.050.000.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	193.179.300,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	363.511.786,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	326.117.440,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	60.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.584.465.600,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	0,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	325.595.561,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	440.750.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	875.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	652.234.880,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	85.700.846.400,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	420.225.429,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.876.827.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.956.704.640,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	83.208.825.600,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	0,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	1.494.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	1.315.202.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	4.460.000,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	600.000,00
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	4.460.000,00
		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	230.000,00
Total			1.326.446.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.326.446.000,00
<b>F SPM Bidang Sosial</b>			
1.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	45.900.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	97.794.000,00
		Penyediaan Permakanan	383.823.000,00
		Penyediaan Sandang	52.206.000,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	440.750.000,00
Total			1.020.473.000,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.211.932.280,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2.785.285.645,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.650.046.110,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	372.101.970,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	253.308.560,00
		Penyediaan Permakanan	8.239.540.800,00
		Penyediaan Sandang	1.891.994.900,00
Total			16.404.210.265,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.331.337.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	543.250.000,00
		Pemulasaraan	263.299.400,00
		Penyediaan Alat Bantu	28.209.550,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	555.988.750,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	807.262.954,00
		Penyediaan Permakanan	10.248.590.000,00
		Penyediaan Sandang	1.694.120.670,00
Total			16.472.058.324,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1.912.869.500,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.178.663.212,00
		Penyediaan Alat Bantu	646.233.225,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	380.973.750,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	1.462.175.400,00
		Penyediaan Permakanan	10.920.749.600,00
		Penyediaan Sandang	1.286.357.580,00
Total			17.788.022.267,00
5.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	635.643.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	622.694.960,00
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	121.882.370,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	659.734.440,00
		Penyediaan Permakanan	6.635.112.000,00
		Penyediaan Sandang	1.077.693.660,00
Total			9.752.760.430,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			61.437.524.286,00

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Halaman 6



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.299.015.904.813,0 0	4.964.992.542.652,0 0
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.917.139.012.805,0 0	3.645.698.302.238,0 0
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.198.908.569,00	7.630.000,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.796.589.235,00	4.402.019.440,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	344.424.325,00	121.380.000,00
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	334.180.673,00	7.630.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.707.567.154.385,0 0	4.765.278.377.385,0 0
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.103.131.376.468,0 0	793.821.307.520,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.750.000.000,00	3.801.458.000,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	70.000.000,00	164.433.200,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.725.000.000,00	2.120.605.260,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	361.762.566.100,00	416.422.402.365,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	299.085.082.000,00	177.727.655.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25.150.000.000,00	15.137.459.500,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.150.000.000,00	124.479.000,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	850.000.000,00	237.459.500,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	700.000.000,00	100.000.000,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.121.349.000,00	16.021.951.000,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	53.350.808.000,00	36.085.026.580,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	756.446.000,00	756.446.000,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	530.005.082.267,00	394.669.739.739,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.695.000.000,00	1.155.990.640,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.000.000.000,00	1.808.800.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.608.425.000,00	360.579.280,00
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.650.000.000,00	354.900.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	43.740.831.000,00	31.048.210.000,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.120.910.000,00	2.733.590.000,00
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000,00	18.300.000,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.971.370.000,00	84.638.252.000,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.850.000.000,00	7.090.202.000,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	87.210.797.000,00	40.153.288.000,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	500.000.000,00	1.410.496.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	211.482.496.750,00	231.753.352.060,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.993.347.600,00	3.831.175.730,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	69.672.032.692,00	61.737.720.642,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	377.214.400.000,00	169.340.630.300,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	7.431.923.530,00	6.227.325.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	204.059.674.153,00	205.495.031.435,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.633.133.329,00	38.527.000,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	61.447.267.292,00	41.729.317.042,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	18.183.516.847,00	1.940.817.985,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.750.000.000,00	702.013.588,00
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	5.754.939.671,00	2.696.975.750,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.779.455.000,00	26.914.909.042,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.700.000.000,00	1.199.628.814,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.274.650.000,00	923.730.724,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.105.000.000,00	279.659.328,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	300.000.000,00	133.652.038,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.760.001.384,00	629.260.852,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.056.300.000,00	865.351.264,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	163.118.225.000,00	171.244.444.000,00
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.380.000.000,00	3.801.720.000,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	210.000.000,00	203.320.000,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.357.366.000,00	565.000.000,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	177.850.000,00	75.000.000,00
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	122.150.000,00	75.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.303.797.200,00	43.706.633.200,00
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	864.078.000,00	600.000.000,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.248.194.000,00	2.736.032.700,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.590.731.200,00	675.000.000,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	500.000.000,00	210.000.000,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.897.928.800,00	837.667.300,00
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100.000.000,00	50.000.000,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	625.000.000,00	170.050.000,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	450.000.000,00	1.235.000.000,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	735.000.000,00	413.250.000,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.449.227.000,00	1.803.000.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	185.000.000,00	51.364.976,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100.000.000,00	48.585.700,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	637.700.000,00	672.223.444,00
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	120.000.000,00	65.503.880,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	96.747.032.000,00	75.018.812.820,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	12.000.000.000,00	5.975.715.248,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.250.000.000,00	9.988.716.932,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	717.420.373.888,00	615.899.564.940,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.134.927.776.430,00	5.224.837.966.658,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.818.889.000,00	7.834.465.744,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	19.771.839.012,00	15.492.612.638,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.750.707.258,00	43.247.965.078,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	25.478.267.870,00	8.789.743.000,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.741.220.943,00	70.297.393.449,00
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	58.998.835.700,00	41.739.076.194,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.223.428.000,00	28.307.156.000,00
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3.833.400.000,00	3.329.700.000,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	94.216.850.088,00	97.338.010.510,00
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	10.081.131.912,00	4.445.916.490,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.000.000.000,00	69.512.163.000,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14.165.799.000,00	4.209.446.000,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.953.000.000,00	38.892.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.460.851.770,00	23.614.388.000,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	12.950.000.000,00	5.085.000.000,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	168.492.547.500,00	165.877.547.500,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.814.000.000,00	1.677.196.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.800.000.000,00	1.429.804.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	170.000.000.000,00	203.850.000.000,00

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000						DINAS PENDIDIKAN	8.055.643.682.584,00	8.348.470.904.495,00	7.626.403.381.132,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.055.643.682.584,00	8.348.470.904.495,00	7.626.403.381.132,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	8.055.643.682.584,00	8.348.470.904.495,00	7.626.403.381.132,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.255.583.161.783,00	5.648.135.178.695,00	4.926.150.827.132,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000.000,00	3.103.875.400,00	3.494.386.132,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	232.240.000,00	415.266.400,00	257.130.020,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	232.240.000,00	153.244.000,00	215.450.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	232.240.000,00	215.876.000,00	37.050.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	232.240.000,00	259.300.000,00	37.050.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	232.240.000,00	321.300.000,00	37.050.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	398.900.000,00	521.115.000,00	1.638.236.872,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	439.900.000,00	1.217.774.000,00	1.272.419.240,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.193.190.166.175,00	5.148.389.037.000,00	4.734.604.177.228,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.186.348.334.000,00	5.125.886.317.000,00	4.716.772.791.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.053.831.175,00	21.492.480.000,00	17.083.915.224,00
1.01.0.00.0.00.01.0001						SMK NEGERI 1 SURABAYA	1.749.320.775,00	1.746.820.775,00	1.731.970.775,00
1.01.0.00.0.00.01.0001	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.250.000,00	1.250.000,00	1.753.558,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0002						SMK NEGERI 5 SURABAYA	336.500.000,00	334.000.000,00	319.150.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0002	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.508.000,00	15.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0003						SMK NEGERI 6 SURABAYA	417.830.700,00	415.330.700,00	400.480.700,00
1.01.0.00.0.00.01.0003	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000,00	4.276.000,00	1.506.460,00
1.01.0.00.0.00.01.0004						SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO	1.475.260.240,00	1.472.760.240,00	1.457.910.240,00
1.01.0.00.0.00.01.0004	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0006						SMK NEGERI 2 MALANG	814.000.000,00	809.000.000,00	779.300.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0006	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.284.000,00	34.284.000,00	14.994.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0008						SMK NEGERI 11 MALANG	387.400.000,00	382.400.000,00	352.700.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0008	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.168.000,00	26.280.000,00	1.450.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0009						SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	262.000.000,00	257.000.000,00	227.300.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0009	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000,00	45.000.000,00	15.300.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0010						SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	1.259.500.000,00	1.254.500.000,00	1.224.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0010	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.604.000,00	17.820.000,00	600.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0012						SMK NEGERI 2 BONDOWOSO	372.525.500,00	367.525.500,00	337.825.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0012	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.700.000,00	15.700.000,00	15.300.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0013						SMK NEGERI 5 JEMBER	688.800.000,00	683.800.000,00	654.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0013	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.036.000,00	36.940.000,00	14.520.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0014						SMK NEGERI 3 MADIUN	349.441.200,00	344.441.200,00	314.741.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0014	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.364.000,00	36.070.000,00	12.810.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0015						SMK NEGERI 1 PACITAN	140.000.000,00	135.000.000,00	105.300.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0015	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.324.000,00	13.410.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0016						SMK NEGERI 2 KOTA PASURUAN	189.790.000,00	184.790.000,00	155.090.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0016	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.344.000,00	41.020.000,00	11.320.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0018						SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI	465.500.000,00	460.500.000,00	430.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0018	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.924.000,00	30.924.000,00	9.204.080,00
1.01.0.00.0.00.01.0020						SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO	280.000.000,00	275.000.000,00	245.300.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0020	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.800.000,00	43.150.000,00	13.450.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0021						CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	208.450.996.140,00	152.308.746.400,00	130.461.637.556,00
1.01.0.00.0.00.01.0021	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228.800.000,00	158.150.400,00	49.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0022						CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	61.298.824.767,00	68.289.287.600,00	58.503.652.190,00
1.01.0.00.0.00.01.0022	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.300.000,00	69.720.000,00	142.179.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0023						CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	70.849.250.758,00	50.095.534.000,00	43.022.621.950,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	168.492.547.500,00	167.622.547.500,00	165.877.547.500,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	168.492.547.500,00	167.622.547.500,00	165.877.547.500,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	168.292.547.500,00	167.422.547.500,00	165.777.547.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.814.000.000,00	4.905.080.000,00	1.677.196.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.814.000.000,00	4.905.080.000,00	1.677.196.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.464.000.000,00	4.555.080.000,00	1.647.392.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	9.804.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.800.000.000,00	2.838.920.000,00	1.429.804.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3.800.000.000,00	2.838.920.000,00	1.429.804.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.650.000.000,00	2.688.920.000,00	1.420.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	9.804.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	170.000.000.000,00	191.510.000.000,00	203.850.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	170.000.000.000,00	191.510.000.000,00	203.850.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	164.850.000.000,00	187.350.000.000,00	202.728.842.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.500.000.000,00	3.126.800.000,00	590.550.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	3.100.000.000,00	483.200.000,00	480.607.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>29.001.663.211.297,00</b>	<b>29.257.110.224.297,00</b>	<b>27.227.708.425.426,00</b>

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.525.391.000,00	99.609.000,00	0,00	0,00	2.625.000.000,00
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	918.645.000,00	31.355.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.119.167.000,00	5.833.000,00	0,00	0,00	1.125.000.000,00
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33.589.598.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	33.639.598.000,00
6	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00
7	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	397.892.240,00	0,00	0,00	0,00	397.892.240,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BIRO PEREKONOMIAN	4.506.152.943,00	9.765.000,00	0,00	0,00	4.515.917.943,00
9	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN	48.348.779.190,00	17.338.750.770,00	0,00	0,00	65.687.529.960,00
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	DINAS PERHUBUNGAN	4.042.894.800,00	2.538.105.200,00	0,00	0,00	6.581.000.000,00
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PERHUBUNGAN	154.047.601.542,00	1.394.814.090,00	0,00	0,00	155.442.415.632,00
12	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	278.440.465.999,00	16.654.419.505,00	0,00	0,00	295.094.885.504,00
13	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	31.040.920.000,00	7.290.000,00	0,00	0,00	31.048.210.000,00
14	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	756.446.000,00	0,00	0,00	0,00	756.446.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
15	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	4.182.099.000,00	26.704.973.500,00	0,00	0,00	30.887.072.500,00
16	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	237.459.500,00	0,00	0,00	0,00	237.459.500,00
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	2.137.459.500,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00	15.137.459.500,00
18	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	914.524.000,00	0,00	0,00	0,00	914.524.000,00
19	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	354.900.000,00	0,00	0,00	0,00	354.900.000,00
20	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	124.479.000,00	0,00	0,00	0,00	124.479.000,00
21	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
340	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	423.596.490,00	0,00	0,00	0,00	423.596.490,00
341	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	15.159.214.450,00	5.383.060,00	0,00	0,00	15.164.597.510,00
342	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	839.820.000,00	0,00	0,00	0,00	839.820.000,00
343	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	13.542.574.575,00	100.749.425,00	0,00	0,00	13.643.324.000,00
344	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.650.839.600,00	0,00	0,00	0,00	4.650.839.600,00
345	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	67.637.072.553,00	1.277.320.896,00	0,00	0,00	68.914.393.449,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
346	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	48.585.700,00	0,00	0,00	0,00	48.585.700,00
347	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	51.364.976,00	0,00	0,00	0,00	51.364.976,00
348	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	438.923.444,00	233.300.000,00	0,00	0,00	672.223.444,00
349	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	65.503.880,00	0,00	0,00	0,00	65.503.880,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.770.816.665.709,00</b>	<b>825.150.808.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.595.967.474.213,00</b>

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						86		86
Golongan IV/d	1	15				113		129
Golongan IV/c		46	3			2078		2127
Golongan IV/b		5	151	7		2843		3006
Golongan IV/a		1	206	264		3988	117	4576
Golongan III/e								
Golongan III/d			22	365		7745	807	8939
Golongan III/c				104		3413	429	3946
Golongan III/b				7		4065	1070	5142
Golongan III/a						2049	3010	5059
Golongan II/e								
Golongan II/d						717	1261	1978
Golongan II/c						1095	918	2013
Golongan II/b						9	123	132
Golongan II/a						151	240	391
Golongan I/e								
Golongan I/d							46	46
Golongan I/c							12	12
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK						22267	1172	23439

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025  
Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**PROVINSI JAWA TIMUR  
DAFTAR PIUTANG DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	1.1.06 - Piutang Pendapatan	2024	590.982.408.655,15	0,00	0,00	590.982.408.655,15
2	1.1.09 - Piutang Lainnya	2024	9.246.741.410,00	0,00	0,00	9.246.741.410,00
3	1.1.10 - Penyisihan Piutang	2024	-84.211.625.926,34	0,00	0,00	-84.211.625.926,34
	Total		516.017.524.138,81	0,00	0,00	516.017.524.138,81

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025  
Gubernur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
<b>I PENYERTAAN MODAL</b>												
1	1999	PT. BANK JATIM	Surat Keputusan Menkumham No. AHU-15113.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 23 April 2009	Saham	9.000.000.000.000,00	1.919.228.412.000,00	-	1.919.228.412.000,00	7.080.771.588.000,00	425.000.000.000,00	-	1.919.228.412.000,00
2	2000	PT. BPR JATIM	Surat Keputusan Menkumham No. AHU-14448.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 30 April 2014	Saham	500.000.000.000,00	360.380.300.000,00	-	360.380.300.000,00	139.619.700.000,00	10.600.000.000,00	-	360.380.300.000,00
3	1999	PT. PWU JATIM	Perda Nomor 5 Tahun 1999	Saham	250.000.000.000,00	145.935.058.500,00	-	145.935.058.500,00	104.064.941.500,00	1.900.000.000,00	-	145.935.058.500,00
4	1974	PT. SIER	Surat Keputusan Menkumham No. AHU-73601.AH.01.02 tahun 2006	Saham	800.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	750.000.000.000,00	19.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00
5	1997	PT. ASKRIDA	Akta No. 24/2010 tanggal 19 Mei 2010	Saham	400.000.000.000,00	9.420.000.000,00	-	9.420.000.000,00	390.580.000.000,00	-	-	9.420.000.000,00
6	2005	PT. JATIM GRHA UTAMA	Perda Nomor 13 Tahun 2008	Saham	950.000.000.000,00	785.674.114.000,00	-	785.674.114.000,00	164.325.886.000,00	2.000.000.000,00	-	785.674.114.000,00
7	2006	PT. PETROGAS JATIM UTAMA	Akta Perubahan No. 44 Th. 2009 tanggal 12 Juni 2009 oleh Notaris Evi Mardiana Hidayah, SH	Saham	1.500.000.000.000,00	453.809.468.000,00	-	453.809.468.000,00	1.046.190.532.000,00	34.500.000.000,00	-	453.809.468.000,00
8	2004	PT. JATIM KRIDA UTAMA	Akta Pendirian Nomor 30/2004 tanggal 16 Juni 2004 oleh Notaris Rosida, SH	Saham	7.000.000.000,00	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	5.200.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00
9	1987	PT. AIR BERSIH	Perda Nomor 2 Tahun 1987 juncto Perda No. 12 Tahun 1996 Perda No. 3 Tahun 2017	Saham	500.000.000.000,00	248.222.000.000,00	-	248.222.000.000,00	251.778.000.000,00	1.300.000.000,00	-	248.222.000.000,00
10	2009	PT. Jamkrida Jatim	Perda No. 4 Tahun 2009 tanggal 17 Nopember 2009 oleh Notaris Untung Darmosewirjo, SH	Saham	600.000.000.000,00	179.500.000.000,00	-	179.500.000.000,00	420.500.000.000,00	3.100.000.000,00	-	179.500.000.000,00
11	2020	PT. Bank Jatim Syariah	Perda No. 10 Tahun 2018	Saham	525.000.000.000,00	-	-	-	525.000.000.000,00	-	-	-
<b>JUMLAH I</b>					<b>15.032.000.000.000,00</b>	<b>4.153.969.352.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.153.969.352.500,00</b>	<b>10.878.030.647.500,00</b>	<b>497.400.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.153.969.352.500,00</b>

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
<b>II INVESTASI DANA BERGULIR</b>												
1	2004	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	40.000.000.000,00	-	-	-	40.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00
2	2005	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-	-	-	90.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00	-	-	-	35.000.000.000,00
3	2006	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-	-	-	120.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 61 Th 2003	Modal Bergulir	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	-	-	-	65.000.000.000,00
4	2007	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	-	19.000.000.000,00	-	-	-	139.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	-	28.000.000.000,00	-	-	-	93.000.000.000,00
5	2008	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	8.000.000.000,00	-	-	-	147.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	4.500.000.000,00	-	-	-	97.500.000.000,00
6	2009	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	147.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2006	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	97.500.000.000,00
7	2010	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 66 Th 2009	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	147.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 66 Th 2009	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	97.500.000.000,00
8	2011	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 66 Th 2009	Modal Bergulir	(50.000.000.000,00)	(50.000.000.000,00)	-	(50.000.000.000,00)	-	-	-	97.000.000.000,00
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 66 Th 2009	Modal Bergulir	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-	60.000.000.000,00	-	-	-	157.500.000.000,00
9	2012	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	(27.533.992.548,28)	(27.533.992.548,28)	-	(27.533.992.548,28)	-	225.124.119,64	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	(37.000.000.000,00)	(37.000.000.000,00)	-	(37.000.000.000,00)	-	-	-	120.500.000.000,00
10	2013	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	7.203.669.997,19	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
11	2014	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	6.500.852.889,32	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
12	2015	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	4.890.969.429,05	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 21 Th 2012	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
13	2016	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 24 Th 2016	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	3.543.481.981,80	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 24 Th 2016	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
14	2017	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 24 Th 2016	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	2.808.352.493,32	-	69.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 24 Th 2016	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	120.500.000.000,00
15	2018	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 4 Th 2018	Modal Bergulir	(18.000.000.000,00)	(18.000.000.000,00)	-	(18.000.000.000,00)	-	3.370.898.457,27	-	51.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 4 Th 2018	Modal Bergulir	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	-	(15.000.000.000,00)	-	-	-	105.500.000.000,00
16	2019	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 4 Th 2018	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	3.493.251.739,94	-	51.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 4 Th 2018	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	105.500.000.000,00
17	2020	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	3.140.191.874,36	-	51.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	105.500.000.000,00
18	2021	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	(5.000.000.000,00)	-	-	(5.000.000.000,00)	-	-	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	12.000.000.000,00	-	-	12.000.000.000,00	-	959.541.045,05	-	117.500.000.000,00
19	2022	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	1.955.783.997,34	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
20	2023	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	1.189.700.171,59	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
21	2024	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	338.463.262,15	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
22	2025	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	560.728.000,00	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
23	2026	PT. BANK JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	460.728.000,00	-	46.466.007.451,72
		PT. BPR JATIM	Pergub Jatim No. 37 Th 2020	Modal Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	117.500.000.000,00
<b>JUMLAH II</b>					<b>163.966.007.451,72</b>	<b>156.966.007.451,72</b>	-	<b>163.966.007.451,72</b>	-	<b>40.641.737.458,02</b>	-	<b>163.966.007.451,72</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					<b>15.195.966.007.451,70</b>	<b>4.310.935.359.951,72</b>	-	<b>4.317.935.359.951,72</b>	<b>10.878.030.647.500,00</b>	<b>538.041.737.458,02</b>	-	<b>3.599.456.119.227,52</b>

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur Jawa Timur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada Akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T -1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
I	Aset Tetap					
1.	Tanah	Tanah	14.393.757.779.606,76	3.000.000.000,00	16.000.000,00	14.486.917.107.687,76
2.	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin	16.949.771.885.961,40	467.210.149.648,00	500.000.000,00	18.284.906.913.635,73
3.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan	12.868.187.858.214,66	295.173.789.378,00	150.000.000,00	13.754.391.544.509,66
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.967.150.034.187,94	182.881.196.121,00	0,00	16.666.654.031.184,95
5.	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya	532.515.069.637,96	143.173.490.640,00	0,00	631.227.489.547,96
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	748.453.870.232,09	0,00	0,00	748.453.870.232,09
	Jumlah Aset Tetap		61.459.836.497.840,81	1.091.438.625.787,00	666.000.000,00	64.572.550.956.798,15
II	Aset Lainnya					
1	Aset Lainnya	Aset Lainnya	917.915.569.626,62	3.209.105.000,00	0,00	921.108.735.526,62
	Jumlah Aset Lainnya		917.915.569.626,62	3.209.105.000,00	0,00	921.108.735.526,62
	<b>JUMLAH ASET TETAP DAN ASET LAINNYA</b>		<b>62.377.752.067.467,43</b>	<b>1.094.647.730.787,00</b>	<b>666.000.000,00</b>	<b>65.493.659.692.324,77</b>

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur Jawa Timur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Lampiran XIV : Peraturan Daerah  
Nomor : 6 Tahun 2025  
Tanggal : 31 Desember 2025

**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur Jawa Timur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Lampiran XV : Peraturan Daerah  
Nomor : 6 Tahun 2025  
Tanggal : 31 Desember 2025

**PROVINSI JAWA TIMUR  
DAFTAR DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke Kas daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur Jawa Timur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PROVINSI JAWA TIMUR  
DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	PT. SMI	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2020	23 November 2020	55.059.729.025,00	8 Tahun	-	Pemeliharaan Berkala Infrastruktur Jalan	9.176.622.240,00	-	18.353.240.065,00	-
Jumlah				55.059.729.025,00				9.176.622.240,00	-	18.353.240.065,00	-

Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2025

Gubernur Jawa Timur

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.  
NIP 198104042010011017